

The Legal Protection for Banks in Hawalah Transactions based on Indonesian Law = Perlindungan Hukum Bagi Bank Dalam Transaksi Hawalah Berdasarkan Hukum Indonesia

Aqila Victorinet Viyata Albertina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20523215&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam produk perbankan berbasis syariah. Bank Syariah dalam menjalankan usahanya harus selalu memperkaya produknya untuk memenuhi kebutuhan objektif masyarakat modern dalam menjawab kebutuhan umat akan perbankan modern namun tetap sejalan dengan ajaran Islam. Hawalah sebagai salah satu produk yang dirumuskan oleh bank syariah sebagai akad yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, praktik Hawalah juga tidak luput dari risiko, terutama bagi pihak bank. Untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi oleh nasabah, bank syariah memiliki upaya untuk mengantisipasi risiko akad hawalah. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hawalah berdasarkan hukum Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Bank dalam suatu transaksi Hawalah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan tentang hawalah diatur dalam beberapa undang-undang seperti dalam Fatwa Dewan Nasional, UU No.21 Tahun 2008 dan POJK. Perlindungan hukum yang diberikan kepada bank dilakukan melalui cara-cara preventif dan represif, dimana cara-cara tersebut membantu bank untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Tesis ini menyarankan agar peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap cukup, namun sebaiknya bank lebih berupaya mencegah pembiayaan macet yaitu melalui perlindungan hukum preventif yang telah diberikan kepada bank. Selain itu, untuk mencegah terjadinya default bank juga harus memaksimalkan perlindungan hukum yang represif.

.....The development of Syariah banks in Indonesia encourages the birth of new innovations in sharia-based banking products. Syariah Banks in carrying out their business should always enrich its products to meet the objective needs of modern society in responding to the ummah's need for modern banking but still in line with Islamic teachings. Hawalah as one of the product that syariah banks formulates as akad that is expected to be a solution to the problems faced by the Indonesian people. However, the practice of Hawalah is also not spared from risk, especially for the bank. In order to anticipate the occurrence of default by customers, Islamic banks have efforts to anticipate the risk of hawalah contracts. Therefore, the problem that will be examined in this thesis are how are the applicable law and regulations regarding hawalah based on Indonesian law and how are the legal protection provided for the Bank in a Hawalah transaction. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that the law and regulation on

hawalah is stipulated under several laws such as under the National Council Fatwa, Law No.21 Year 2008 and POJK. The legal protection provided for the banks are carried out through preventive and repressive ways, in which such ways helps the bank to prevent the occurrence of default. This thesis suggest that the prevailing law and regulations are considered sufficient, but rather the banks should put in more efforts in preventing a bad financing which is through the preventive legal protection that has been provided for banks. Moreover, to prevent the occurrence of default to happen banks should also maximize its repressive legal protection.